



TRANSFORMASI RANTAI NILAI PALA (*Myristica fragrans houtt*) BERKELANJUTAN: SINERGI KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN HILIRISASI AGROINDUSTRI MENUJU KETAHANAN PANGAN DI ERA PERUBAHAN IKLIM

**Edwen D. Waas^{1*}, A. Kastanya², Esther Kembauw², Imanuel B. D. Kapelle²,
 Anna Y. Wattimena², Wahid³, Maryam Nurdin⁴**

¹ Organisasi Riset Pertanian Pangan, Pusat Riset Tanaman Perkebunan, Badan Riset Inovasi Nasional/BRIN, KST Soekarno, Jl. Raya Jakarta-Bogor, Kabupaten Bogor, Cibinong

²Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Ambon, Jl. Ir. M. Putuhena, Poka Kecamatan Teluk Ambon

³Organisasi Riset Pertanian Pangan, Pusat Riset Tanaman Pangan, Badan Riset Inovasi Nasional/BRIN, KST Soekarno, Jl. Raya Jakarta-Bogor, Kabupaten Bogor, Cibinong

⁴Organisasi Tata Kelola Pemerintahan Ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat, Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler, Badan Riset Inovasi Nasional/BRIN, Kawasan Jakarta Gatot Subroto, Jl. Gatot Subroto No 10 Jakarta Selatan

* Email: edwenwaas@gmail.com

Article Info	
Article History Received : 02-06-2026 Accepted : 30-06-2026 Online : 02-07-2026 Kata Kunci: rantai nilai pala; sinergi kelembagaan; hilirisasi agroindustri; pertanian berkelanjutan; perubahan iklim Keywords <i>Nutmeg value chain; institutional synergy; agro-industrial downstream development; sustainable agriculture; climate change;</i>	Abstrak: Transformasi berkelanjutan komoditas rempah berbasis petani kecil memerlukan tindakan kelembagaan yang terkoordinasi serta kebijakan hilirisasi yang jelas, namun pengembangan pala (<i>Myristica fragrans houtt</i>) di Provinsi Maluku masih terkendala oleh peran pemangku kepentingan yang terfragmentasi dan kelembagaan petani yang lemah. Penelitian ini memetakan rantai nilai pala, struktur kelembagaan, dan tingkat produktivitas di enam kabupaten/kota di Maluku menggunakan metode survei deskriptif kualitatif dan analisis SWOT yang melibatkan petani, pengumpul desa, pedagang besar, dan eksportir. Hasil menunjukkan produktivitas pala hanya sebesar 0,14 ton/ha, setara 40–60% dari potensi hasil, dengan partisipasi kelompok tani serendah 0% di sebagian besar kabupaten (kecuali Buru Selatan 100% dan Buru 35%), peran koperasi praktis tidak ada, dan bantuan pemerintah masih didominasi bibit ketimbang input peningkatan produktivitas. Rantai pemasaran ditemukan panjang dengan harga yang ditentukan sepihak oleh pengumpul dan tengkulak, melemahkan posisi tawar petani, meskipun terdapat tiga local champion (PT. Kamboti Rempah Maluku, CV. Maenusu, dan PT. Bayumas) yang telah mengorganisasi rantai nilai berorientasi ekspor dengan melibatkan sekitar 2.000 petani. Penelitian ini mengusulkan kerangka kebijakan dua lapis: kebijakan umum untuk mensinergikan sumber daya dan daya saing pemangku kepentingan, serta kebijakan teknis yang mencakup perbaikan budidaya, peningkatan kapasitas SDM, penguatan kelembagaan, investasi, dan sistem informasi manajemen. Temuan ini menegaskan bahwa inovasi teknologi semata tidak cukup tanpa transformasi kelembagaan dan hilirisasi agroindustri untuk membangun ketahanan pangan berbasis pala yang berkelanjutan dan tahan iklim di Indonesia Timur. Abstract: The sustainable transformation of smallholder-based spice commodities requires coordinated institutional actions and clear

downstreaming policies. However, the development of nutmeg (*Myristica fragrans* Houtt.) in Maluku Province remains constrained by fragmented stakeholder roles and weak farmer institutions. This study maps the nutmeg value chain, institutional structure, and productivity levels across six districts/cities in Maluku using a qualitative descriptive survey method combined with SWOT analysis, involving farmers, village collectors, wholesalers, and exporters. The results show that nutmeg productivity is only 0.14 tons/ha, equivalent to 40–60% of its potential yield. Farmer group participation is extremely low, reaching 0% in most districts (except South Buru at 100% and Buru at 35%), while the role of cooperatives is practically absent. Government support is still dominated by seed distribution rather than productivity-enhancing inputs. The marketing chain is found to be long, with prices largely determined unilaterally by collectors and middlemen, weakening farmers' bargaining position. Despite these challenges, three local champions—PT Kamboti Rempah Maluku, CV Maenusu, and PT Bayumas—have successfully organized export-oriented value chains involving approximately 2,000 farmers. This study proposes a two-tier policy framework: general policies aimed at synergizing stakeholder resources and competitiveness, and technical policies covering improvements in cultivation practices, human resource capacity building, institutional strengthening, investment, and management information systems. These findings underscore that technological innovation alone is insufficient without institutional transformation and agro-industrial downstreaming to build sustainable, climate-resilient, nutmeg-based food security in Eastern Indonesia.

Support by:



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. PENDAHULUAN

Pala (*Myristica fragrans* Houtt) merupakan komoditas rempah unggulan Indonesia yang memasok 66–77% kebutuhan pala dunia, dengan 99,2% produksinya diusahakan oleh petani kecil di lima provinsi utama, termasuk Maluku. Sebagai komoditas yang telah menjadi identitas historis dan ekonomi Provinsi Maluku sejak era kolonial, pala memiliki posisi strategis dalam mendukung perekonomian rumah tangga petani di wilayah kepulauan ini, dengan luas areal mencapai 31.675 ha dan produksi 5.774 ton pada tahun 2018 (Ditjenbun, 2018; BPS Maluku, 2021). Namun demikian, potensi ekonomi tersebut belum diiringi dengan tata kelola rantai nilai dan kelembagaan yang memadai untuk mengoptimalkan nilai tambah bagi petani maupun daerah.

Tanaman pala di Provinsi Maluku secara umum belum dapat disebut sepenuhnya sebagai tanaman perkebunan modern, karena mayoritas populasi tanaman merupakan hasil perkembangbiakan alami yang tumbuh di hutan ulayat dan diwariskan secara turun-temurun. Pola budidaya yang masih tradisional, dikombinasikan dengan lemahnya kelembagaan petani dan panjangnya rantai pemasaran, menyebabkan produktivitas pala Maluku tergolong rendah, yaitu hanya berkisar 0,14 ton/ha atau setara 40–60% dari potensi produksi tanaman. Rendahnya produktivitas ini berimplikasi langsung pada rendahnya pendapatan petani, mengingat pala merupakan tanaman musiman yang hanya memberikan hasil optimal selama sekitar enam bulan dalam setahun, sementara belum berkembang tanaman sela sebagai sumber pendapatan alternatif pada masa sela panen.

Pada sisi hilir, telah terbangun rantai nilai ekspor melalui sejumlah local champion, yaitu PT. Kamboti Rempah Maluku (PT. KRM) yang mengeksport ke Belanda, CV. Maenusu yang mengeksport ke Tiongkok dengan melibatkan sekitar 2.000 petani melalui sepuluh pengumpul mitra, serta PT. Bayumas yang mendistribusikan pala melalui Surabaya. Pemerintah Provinsi Maluku bahkan telah merealisasikan ekspor langsung perdana ke Tiongkok melalui

Pelabuhan Yos Sudarso Ambon pada Maret 2021—pencapaian penting setelah 21 tahun sejak konflik 1999. Akan tetapi, keberhasilan di simpul hilir ini belum diimbangi oleh penguatan kelembagaan di simpul hulu. Survei lapangan menunjukkan bahwa partisipasi petani dalam kelompok tani sangat rendah—mencapai 0% di sebagian besar kabupaten, kecuali Buru Selatan (100%) dan Buru (35%)—sementara koperasi praktis tidak berperan kecuali di sebagian kecil wilayah Buru Selatan (50%). Kondisi ini menyebabkan petani tetap bergantung pada tengkulak dan pengumpul yang sepenuhnya menentukan harga, tanpa ruang negosiasi bagi petani.

Dalam konteks tema transformasi pertanian berkelanjutan melalui inovasi teknologi dan hilirisasi agroindustri untuk ketahanan pangan di era perubahan iklim, kesenjangan antara potensi sumber daya pala dan lemahnya tata kelola kelembagaan ini menjadi isu strategis. Perubahan iklim yang meningkatkan variabilitas produksi pertanian menuntut sistem kelembagaan yang adaptif dan kolaboratif sebagai prasyarat bagi keberhasilan inovasi teknologi maupun hilirisasi produk. Tanpa sinergi kelembagaan yang kuat antara petani, pemerintah, swasta, dan masyarakat madani, investasi pada teknologi maupun infrastruktur ekspor berisiko tidak berkelanjutan, karena fondasi produksi di tingkat hulu—produktivitas, mutu, dan kontinuitas pasokan—tetap rentan dan tidak terkelola secara sistemik.

Penelitian ini merupakan bagian dari kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, dengan sasaran wilayah meliputi Kabupaten Seram Bagian Barat, Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis komoditas unggulan lokal melalui pengembangan usaha lokal potensial, penguatan akses kelompok usaha terhadap keuangan, dan pembentukan pusat inkubasi bisnis mikro.

Permasalahan komoditas pala di Maluku sebagian besar juga dialami daerah penghasil pala lain di Indonesia, antara lain: tanaman kurang produktif, tingkat kesuburan lahan menurun, tingginya serangan organisme pengganggu tanaman, mutu hasil belum memenuhi SNI, cemaran mikotoksin, penanganan rantai pasok yang belum tertata, pencampuran mutu dan varietas, agroindustri hilir yang belum berkembang, serta sumber daya manusia dan kelembagaan petani yang belum optimal. Secara khusus, lemahnya kelembagaan petani—ditunjukkan oleh rendahnya partisipasi dalam kelompok tani dan koperasi—menjadi akar dari berbagai permasalahan turunan seperti posisi tawar yang lemah, ketergantungan pada tengkulak, minimnya akses terhadap bantuan produktif (selain bibit), serta lambannya adopsi inovasi teknologi dan praktik budidaya yang lebih baik. Pada saat yang sama, pemangku kepentingan dalam pengembangan pala di Maluku—pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil—masih cenderung bertindak sendiri-sendiri tanpa kerangka koordinasi yang jelas, sehingga sinergi yang dibutuhkan untuk transformasi rantai nilai secara berkelanjutan belum terwujud. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk memetakan secara komprehensif kondisi rantai nilai, kelembagaan, dan produktivitas pala di Maluku sebagai dasar perumusan strategi kebijakan pengembangan yang tepat.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan dan mengidentifikasi mata rantai produksi (rantai nilai) komoditas pala dari hulu ke hilir serta menentukan tingkat produktivitasnya; (2) memetakan dan mengidentifikasi kondisi kelembagaan petani pada setiap simpul rantai produksi; (3) menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) dalam pengembangan komoditas pala di Provinsi Maluku; serta (4) memberikan rekomendasi kebijakan strategi pengembangan komoditas pala yang memberikan nilai tambah bagi peningkatan produktivitas, ditinjau dari aspek kelembagaan dan tata kelola rantai nilai.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan penguatan kelembagaan dan hilirisasi agroindustri pala, sebagai dasar bagi pelaku usaha (petani, pengumpul, dan eksportir) dalam memperkuat

kemitraan rantai nilai, serta sebagai referensi akademik bagi pengembangan model kelembagaan komoditas perkebunan rakyat di wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan perubahan iklim. Unsur kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi data kuantitatif produktivitas dan kelembagaan multi-kabupaten dengan analisis SWOT partisipatif yang melibatkan seluruh simpul rantai nilai (petani, pengumpul, eksportir, dan pemerintah), sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan bersifat berjenjang (kebijakan umum dan teknis) dan dapat diimplementasikan secara bertahap.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dipadukan dengan analisis SWOT untuk memetakan rantai nilai, kelembagaan, dan produktivitas pala di Provinsi Maluku.

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di enam kabupaten/kota sentra produksi pala di Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, Buru, Buru Selatan, dan Kota Ambon, dengan unit analisis meliputi petani, pedagang pengumpul desa dan kabupaten, eksportir/local champion, serta instansi pemerintah daerah terkait (Bappeda, Dinas Pertanian/Perkebunan).

2. Alat dan Bahan

Instrumen penelitian berupa kuisioner terstruktur dan pedoman wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dikembangkan untuk menjangkau data produktivitas, kepemilikan lahan, pola tanam, kelembagaan, bantuan, pembinaan, jalur pemasaran, dan harga di setiap simpul rantai nilai. Data sekunder diperoleh dari publikasi BPS Provinsi Maluku, Direktorat Jenderal Perkebunan, dan dokumen rencana pembangunan daerah.

3. Rancangan dan Cara Kerja

Penelitian bersifat non-eksperimental deskriptif dengan langkah kerja: (1) wawancara terstruktur kepada petani sampel di setiap kabupaten/kota terkait luas lahan, produktivitas, pola tanam, kelembagaan, bantuan, dan pembinaan; (2) wawancara mendalam kepada pedagang pengumpul dan eksportir/local champion terkait jalur pemasaran, volume, dan harga; (3) diskusi terarah (*focus group discussion*) dengan instansi pemerintah daerah (Bappeda, Dinas Pertanian/Perkebunan) untuk identifikasi peran kelembagaan pembina; serta (4) kompilasi data SWOT melalui sintesis hasil wawancara dan observasi lapangan bersama tim ahli pala Bappeda Provinsi Maluku.

4. Analisis Data

Data kuantitatif (luas lahan, produktivitas, persentase partisipasi kelembagaan) dianalisis secara deskriptif statistik dan ditabulasikan per kabupaten/kota untuk melihat variasi antarwilayah. Data kualitatif hasil wawancara dan FGD dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola rantai nilai, peran masing-masing pelaku, dan titik lemah kelembagaan. Selanjutnya, seluruh temuan disintesis ke dalam matriks SWOT untuk merumuskan strategi pengembangan, yang dibedakan menjadi strategi kebijakan umum (mensinergikan sumber daya dan pemangku kepentingan) dan strategi kebijakan teknis (perbaikan budidaya, SDM, kelembagaan, investasi, dan sistem informasi manajemen).

5. Konsep Rantai Nilai Komoditas Pertanian

Rantai nilai (*value chain*) merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pelaku usaha, mulai dari produksi bahan baku hingga produk sampai ke tangan konsumen akhir, yang masing-masing menambahkan nilai pada setiap tahapannya (Porter, 1985). Dalam konteks komoditas pertanian berbasis petani kecil, Kaplinsky and Morris (2001) menekankan bahwa analisis rantai nilai penting untuk memahami distribusi nilai tambah dan kekuatan tawar (*bargaining power*) antar pelaku, yang pada banyak kasus komoditas perkebunan rakyat di negara berkembang menunjukkan pola yang tidak proporsional, di mana petani sebagai produsen primer justru menerima porsi nilai tambah paling kecil dibandingkan pelaku di simpul tengah dan hilir. Pola ini sejalan dengan rantai nilai pala di Maluku, di mana petani berperan sebagai price taker tanpa kapasitas negosiasi yang memadai.

6. Kelembagaan Petani dalam Pembangunan Pertanian

Kelembagaan petani, baik dalam bentuk kelompok tani maupun koperasi, memiliki peran strategis sebagai wahana kerja sama, unit produksi, dan kelas belajar bagi petani, sekaligus sebagai instrumen untuk memperkuat posisi tawar kolektif dalam menghadapi pelaku usaha di rantai nilai. Lemahnya peran kelembagaan ini pada banyak komoditas perkebunan rakyat di Indonesia Timur seringkali berakar pada minimnya pendampingan berkelanjutan, dominasi bantuan yang bersifat material jangka pendek (bibit, alat) dibandingkan penguatan kapasitas manajerial dan kelembagaan jangka panjang, serta belum optimalnya peran penyuluh pertanian lapangan.

7. Good Handling Practices dan Permentan No. 53/2012

Permentan No. 53/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Penanganan Pascapanen Pala dan Fuli merupakan pedoman teknis bagi petani, kelompok tani, pelaku usaha, dan pembina dalam menerapkan prinsip Good Handling Practices (GHP) berdasarkan Permentan No. 44/2009. Implementasi regulasi ini pada tingkat lapangan sangat bergantung pada keberadaan kelembagaan petani yang fungsional sebagai saluran diseminasi dan pengawasan penerapan standar, sehingga lemahnya kelembagaan petani turut berkontribusi pada lambannya adopsi standar pascapanen yang baik di tingkat hulu rantai pasok.

8. Analisis SWOT dalam Perencanaan Pengembangan Komoditas

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) merupakan metode perencanaan strategis yang umum digunakan untuk mengevaluasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) suatu sistem usaha atau komoditas, sebagai dasar perumusan strategi pengembangan yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Dalam konteks komoditas perkebunan rakyat, analisis SWOT memungkinkan perumusan strategi yang mempertimbangkan secara simultan aspek agronomis, kelembagaan, pasar, dan kebijakan, sehingga rekomendasi yang dihasilkan lebih kontekstual dibandingkan pendekatan sektoral yang terpisah-pisah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Produktivitas dan Pola Pemanfaatan Lahan Pala

Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat produktivitas pala di Provinsi Maluku masih tergolong rendah, yaitu berkisar 0,14 ton/ha, atau hanya 40–60% dari potensi produksi tanaman. Rendahnya produktivitas ini berakar pada beberapa faktor budidaya yang ditemukan secara konsisten di seluruh lokasi survei, antara lain: jarak tanam yang tidak teratur dan cukup rapat (sekitar 5 m x 5 m pada mayoritas lokasi), minimnya penggunaan input produksi (pupuk dan pestisida hampir tidak pernah digunakan di seluruh kabupaten kecuali sebagian kecil di Seram Bagian Timur dan Maluku Tengah), serta sanitasi kebun

yang jarang dilakukan (umumnya hanya 1 kali setiap 3–6 bulan), sehingga serangan organisme pengganggu tanaman seperti penggerek batang, kanker batang, dan busuk buah masih banyak ditemukan.

Pola kepemilikan lahan pala didominasi oleh lahan milik keluarga dengan luas rata-rata 1–2 ha per petani, meskipun terdapat variasi antarwilayah, misalnya di Seram Bagian Barat yang memiliki petani dengan luas lahan lebih dari 4 ha. Sistem pertanaman pala pada umumnya bersifat polikultur, dikombinasikan dengan tanaman tahunan lain seperti cengkih, kelapa, kenari, kakao, durian, dan langsung/duku sebagai vegetasi pelindung maupun sumber pendapatan tambahan. Komposisi umur tanaman menunjukkan proporsi tanaman tua (>40 tahun) yang masih cukup tinggi di beberapa kabupaten seperti Buru Selatan (75%) dan Kota Ambon (46,67%), mengindikasikan kebutuhan peremajaan yang mendesak untuk menjaga keberlanjutan produksi jangka panjang.

2. Rantai Nilai dan Jalur Pemasaran Pala

Rantai pemasaran pala di Provinsi Maluku dapat digambarkan melalui lima jalur utama: (1) petani → pengumpul desa → pengumpul kabupaten/gudang → eksportir; (2) petani → pembeli di desa → eksportir; (3) petani (biji kering tanpa fuli) → eksportir langsung; (4) petani (biji basah tanpa fuli) → pengumpul gudang → eksportir; serta (5) petani → pasar/toko bahan baku → konsumen eceran. Pada hampir seluruh jalur, petani menjual hasil panen dalam waktu kurang dari tiga bulan setelah panen (ditemukan pada 100% petani di SBB, Malteng, Buru, Bursel, dan Ambon, serta 50% di SBT), mengindikasikan minimnya kapasitas penyimpanan dan tekanan kebutuhan tunai jangka pendek yang mendorong petani menjual segera tanpa menunggu harga yang lebih baik.

Pada simpul hilir, telah terbangun rantai nilai ekspor yang relatif terorganisir melalui tiga local champion, yaitu PT. Kamboti Rempah Maluku (PT. KRM) yang mengolah dan mengeksport biji pala ke Belanda melalui Surabaya, CV. Maenusu yang mengeksport langsung ke Tiongkok melalui kerja sama dengan PT. Subur Anugerah Indonesia (PT. SAI) di Jakarta, dan PT. Bayumas yang mendistribusikan pala ke Surabaya untuk diteruskan ke negara tujuan. CV. Maenusu, sebagai contoh rantai nilai yang relatif matang, melibatkan sekitar 2.000 petani melalui sepuluh pengumpul mitra di lima kabupaten/kota, dengan volume ekspor 1–2 kontainer (14–16 ton) per bulan dan mempekerjakan sekitar 30 karyawan, didominasi perempuan. Pemerintah Provinsi Maluku turut memfasilitasi ekspor langsung perdana ke Tiongkok melalui Pelabuhan Yos Sudarso Ambon pada 30 Maret 2021 menggunakan kontainer 40 feet berkapasitas 20 ton—pencapaian bersejarah karena merupakan ekspor langsung pertama dari Maluku sejak konflik 1999—disusul ekspor kedua pada 30 April 2021.

Meskipun demikian, harga di tingkat petani tetap berada pada posisi terlemah dalam struktur rantai nilai. Sebagai ilustrasi, harga biji dan fuli pala basah di tingkat petani berkisar Rp 300.000–750.000 per 1.000 buah, sementara di tingkat pengumpul kabupaten harga biji kering mencapai Rp 80.000/kg dan fuli Rp 100.000/kg, menunjukkan margin yang jauh lebih besar dinikmati oleh simpul tengah dan hilir. Petani umumnya berperan sebagai penerima harga (price taker) tanpa kapasitas negosiasi, sebuah pola yang konsisten dengan kerangka analisis rantai nilai Kaplinsky and Morris (2001) bahwa produsen primer pada rantai nilai komoditas berbasis petani kecil kerap menerima distribusi nilai tambah paling kecil.

c. Kondisi Kelembagaan Petani Pala

Hasil survei kelembagaan menunjukkan gambaran yang memprihatinkan mengenai partisipasi petani dalam organisasi kolektif. Tabel 1 menyajikan ringkasan kondisi kelembagaan dan bantuan pada enam kabupaten/kota lokasi penelitian.

Tabel 1. Kondisi kelembagaan, bantuan, dan pembinaan petani pala per kabupaten/kota (%)

Uraian	SBB	SBT	Malteng	Buru	Bursel	Ambon
Kelompok tani (Ya)	0,00	0,00	33,33	35,00	100,00	0,00
Koperasi (Ya)	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Bantuan: Bibit pala	0,00	100,00	65,00	60,00	75,00	96,67
Bantuan: Pupuk	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Bantuan: Alat pengering (solar drive)	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	3,33
Pembinaan: Penyuluhan	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	73,33
Pembinaan: Pelatihan	0,00	100,00	50,00	0,00	0,00	26,67

Sumber: hasil survei lapangan penelitian

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa partisipasi petani dalam kelompok tani sangat rendah di hampir seluruh kabupaten/kota, dengan pengecualian Buru Selatan yang mencapai 100% dan Buru sebesar 35%. Partisipasi dalam koperasi bahkan lebih rendah, hanya ditemukan di Buru Selatan (50%) dan nihil di lima kabupaten/kota lainnya. Padahal, koperasi secara historis berperan penting sebagai lembaga mediasi antara petani dan pedagang serta sebagai penampung hasil yang dapat memperkuat posisi tawar kolektif. Pada aspek bantuan, jenis bantuan yang paling dominan diterima petani adalah bibit pala (60–100% di SBT, Malteng, Buru, Bursel, dan Ambon), sementara bantuan yang bersifat produktif seperti alat pengering (solar drive) dan pupuk relatif minim dan hanya terkonsentrasi di Maluku Tengah dan sebagian Bursel/Ambon. Pembinaan berupa penyuluhan dan pelatihan juga ditemukan sangat terbatas, dengan SBB sama sekali tidak menerima pembinaan dalam bentuk apa pun, sementara SBT dan Kota Ambon relatif lebih baik.

Pola ini mengindikasikan bahwa intervensi pemerintah selama ini lebih berorientasi pada penyediaan input fisik jangka pendek (bibit) dibandingkan penguatan kapasitas kelembagaan dan manajerial jangka panjang. Tanpa kelembagaan kolektif yang fungsional, petani tidak memiliki kanal sistemik untuk mengakses informasi pasar, melakukan tawar-menawar kolektif, atau mengadopsi inovasi teknologi dan standar pascapanen secara bersama-sama, sehingga setiap petani harus menghadapi rantai nilai secara individual dengan posisi yang sangat lemah.

4. Analisis SWOT Pengembangan Komoditas Pala

Tabel 2. Matriks SWOT pengembangan komoditas pala di Provinsi Maluku

Faktor	Uraian
Kekuatan (Strengths)	Potensi lahan luas dan kesesuaian agroekologi tinggi; keberadaan local champion dengan jejaring ekspor (PT. KRM, CV. Maenusu, PT. Bayumas); pala Banda memiliki reputasi mutu dan indikasi geografis; tersedia dukungan kebijakan pemerintah daerah (fasilitasi ekspor langsung).
Kelemahan (Weaknesses)	Produktivitas rendah (0,14 ton/ha); kelembagaan petani (kelompok tani dan koperasi) sangat lemah; rantai pemasaran panjang dengan posisi tawar petani rendah; sanitasi kebun dan input produksi minim; tanaman tua belum diremajakan secara optimal; mutu hasil belum standar akibat penanganan pascapanen yang lemah.
Peluang (Opportunities)	Permintaan ekspor pala dan produk turunannya (minyak atsiri, oleoresin) yang tetap tinggi secara global; dukungan kebijakan hilirisasi agroindustri nasional; potensi pengembangan ekspor langsung dari Pelabuhan Ambon; peluang diversifikasi

Ancaman (Threats)	produk olahan pala bernilai tambah. Risiko penolakan ekspor berulang akibat kontaminasi aflatoksin; variabilitas iklim (curah hujan dan kelembaban tinggi) yang mengganggu pengeringan alami; persaingan pasar tidak sehat oleh oknum pengumpul; ketergantungan struktural petani pada tengkulak melalui praktik ijon; minimnya permodalan untuk investasi fasilitas pascapanen.
-------------------	--

Berdasarkan matriks SWOT pada Tabel 2, strategi pengembangan komoditas pala di Provinsi Maluku perlu diarahkan pada upaya memanfaatkan kekuatan (potensi lahan dan jejaring ekspor yang sudah terbangun) untuk mengatasi kelemahan struktural (kelembagaan dan produktivitas), sekaligus mengantisipasi ancaman iklim dan pasar melalui pemanfaatan peluang hilirisasi yang didukung kebijakan nasional. Strategi yang relevan antara lain: (1) penguatan kelompok tani dan koperasi sebagai prasyarat bagi program peremajaan dan adopsi GHP secara kolektif; (2) pemberdayaan local champion sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses pasar dan pembinaan teknis bagi petani mitra; (3) diversifikasi bantuan pemerintah dari sekadar bibit menjadi paket teknologi produktif (pupuk, alat pascapanen, pendampingan); serta (4) pengembangan tanaman sela dan produk olahan pala sebagai strategi diversifikasi pendapatan yang sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga petani terhadap musim non-panen dan gangguan iklim.

5. Strategi Kebijakan Sinergi Kelembagaan dan Hilirisasi Agroindustri

Para pemangku kepentingan dalam pengembangan komoditas pala di Maluku saat ini masih cenderung bertindak sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang memadai. Beberapa lembaga yang dibentuk untuk mendukung pengembangan pala, seperti kelompok tani, banyak yang mati suri akibat minimnya pendampingan berkelanjutan. Pengembangan komoditas pala ke depan memerlukan sinergi antar pemangku kepentingan, baik antara pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat madani (LSM, perguruan tinggi, dan tokoh adat), melalui kerangka dialog dan kerja sama yang melibatkan seluruh institusi yang teridentifikasi dalam peta pemangku kepentingan. Dalam hal ini, peran Dewan Rempah Daerah Maluku menjadi sangat strategis sebagai forum koordinasi untuk memberdayakan petani bersama eksportir, mendorong fasilitasi infrastruktur oleh pemerintah daerah, serta memperpendek rantai nilai dari petani langsung ke eksportir di Ambon.

Berdasarkan temuan tersebut, kebijakan pengembangan pala dapat dibagi menjadi dua lapis: kebijakan umum dan kebijakan teknis. Kebijakan umum diarahkan pada upaya mensinergikan seluruh potensi sumber daya tanaman pala dalam rangka peningkatan daya saing usaha, nilai tambah, produktivitas, dan mutu produk, melalui partisipasi aktif pemangku kepentingan dan penerapan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan teknis meliputi: (1) pengembangan tanaman pala melalui peremajaan dan perbaikan praktik budidaya; (2) peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani dan penyuluh; (3) pengembangan kelembagaan dan kemitraan, termasuk revitalisasi kelompok tani dan koperasi; (4) peningkatan investasi usaha, terutama pada fasilitas pascapanen dan infrastruktur ekspor; serta (5) pengembangan sistem informasi manajemen rantai pasok untuk transparansi harga dan mutu.

Pengendalian kontaminasi aflatoksin pada rantai pasok pala—sebagai salah satu ancaman utama dalam matriks SWOT—dapat dilakukan melalui pengawasan terpadu pada tahap pemanenan dan pengeringan di tingkat petani, penerimaan-pengeringan-penyimpanan di tingkat pengumpul, serta penerimaan dan pengiriman di tingkat eksportir, yang seluruhnya akan lebih efektif apabila dilaksanakan melalui kelembagaan petani yang fungsional sebagai kanal pengawasan dan diseminasi standar. Dengan demikian, transformasi kelembagaan

bukan sekadar pelengkap, melainkan prasyarat fundamental bagi keberhasilan inovasi teknologi pascapanen maupun akselerasi hilirisasi agroindustri pala di Provinsi Maluku, khususnya dalam menghadapi tantangan variabilitas iklim yang menuntut respons kolektif dan terkoordinasi.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, produktivitas pala di Provinsi Maluku masih tergolong rendah (0,14 ton/ha, setara 40–60% dari potensi produksi), yang dipengaruhi oleh praktik budidaya yang belum optimal (jarak tanam tidak teratur, minim input produksi, sanitasi kebun jarang dilakukan) serta tingginya proporsi tanaman tua yang belum diremajakan di beberapa kabupaten. Kedua, kelembagaan petani pala sangat lemah, ditunjukkan oleh partisipasi kelompok tani yang nihil di sebagian besar kabupaten/kota (kecuali Buru Selatan 100% dan Buru 35%) dan partisipasi koperasi yang praktis tidak ada, sementara bantuan pemerintah masih didominasi bibit ketimbang input dan pendampingan yang bersifat produktif jangka panjang. Ketiga, rantai nilai pala di Maluku bersifat panjang dengan posisi tawar petani yang sangat lemah sebagai penerima harga (*price taker*), meskipun pada simpul hilir telah terbangun rantai nilai ekspor yang relatif terorganisir melalui tiga *local champion* (PT. Kamboti Rempah Maluku, CV. Maenusu, dan PT. Bayumas) yang melibatkan sekitar 2.000 petani dan telah merealisasikan ekspor langsung perdana melalui Pelabuhan Yos Sudarso Ambon. Keempat, analisis SWOT mengonfirmasi bahwa kekuatan rantai nilai hilir belum diimbangi oleh kekuatan kelembagaan hulu, sementara ancaman aflatoxin dan variabilitas iklim menuntut respons kolektif yang hanya dapat efektif melalui kelembagaan petani yang fungsional. Kelima, strategi pengembangan komoditas pala yang berkelanjutan memerlukan kebijakan dua lapis—kebijakan umum untuk sinergi pemangku kepentingan dan kebijakan teknis untuk perbaikan budidaya, SDM, kelembagaan, investasi, dan sistem informasi manajemen—dengan penguatan kelembagaan petani sebagai prasyarat fundamental, bukan pelengkap, bagi keberhasilan inovasi teknologi maupun hilirisasi agroindustri pala dalam mendukung ketahanan pangan di era perubahan iklim di Provinsi Maluku.

Beberapa saran dapat dikemukakan berdasarkan temuan penelitian. Pertama, pemerintah daerah disarankan memprioritaskan revitalisasi kelompok tani dan koperasi pala di kabupaten/kota dengan partisipasi terendah (SBB, SBT, dan Kota Ambon), dengan mereplikasi model yang relatif berhasil di Buru Selatan sebagai pembelajaran. Kedua, diversifikasi bantuan pemerintah dari sekadar bibit menjadi paket bantuan produktif terintegrasi (alat pascapanen, pupuk, dan pendampingan teknis berkelanjutan) perlu menjadi arah kebijakan ke depan. Ketiga, penguatan peran Dewan Rempah Daerah Maluku sebagai forum koordinasi multipihak perlu didorong secara konkret, termasuk memfasilitasi kemitraan formal antara kelompok tani dengan *local champion* (PT. KRM, CV. Maenusu, dan PT. Bayumas) untuk memperpendek rantai nilai dan meningkatkan porsi nilai tambah bagi petani. Keempat, penelitian lanjutan disarankan untuk mengembangkan dan menguji model bisnis tanaman sela atau produk olahan pala (sirup, manisan, minyak atsiri skala rumah tangga) sebagai strategi diversifikasi pendapatan petani pada masa sela panen, sekaligus mengurangi ketergantungan struktural pada tengkulak melalui praktik ijon. Kelima, perlu dikaji lebih lanjut skema pembiayaan mikro atau kemitraan investasi yang dapat diakses petani dan kelompok tani untuk pengadaan fasilitas pascapanen, mengingat keterbatasan permodalan teridentifikasi sebagai salah satu ancaman utama dalam analisis SWOT penelitian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku atas dukungan pendanaan dan fasilitasi penelitian, bersama Tim

Ahlinya, kepada Dinas Pertanian/Perkebunan kabupaten/kota lokasi penelitian, serta kepada PT. Kamboti Rempah Maluku, CV. Maenusu, dan PT. Bayumas atas kesediaannya berbagi data dan informasi rantai nilai pala selama proses penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku (2021) Kota Ambon dalam Angka. Ambon: BPS Provinsi Maluku.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku (2021) Kabupaten Maluku Tengah dalam Angka. Ambon: BPS Provinsi Maluku.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku (2021) Kabupaten Buru dalam Angka. Ambon: BPS Provinsi Maluku.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku (2021) Kabupaten Buru Selatan dalam Angka. Ambon: BPS Provinsi Maluku.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku (2018) Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Angka. Ambon: BPS Provinsi Maluku.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku (2020) Kabupaten Seram Bagian Barat dalam Angka. Ambon: BPS Provinsi Maluku.
- Direktorat Jenderal Perkebunan (2018) Statistik Perkebunan Indonesia: Pala. Jakarta: Kementerian Pertanian RI.
- Hariyadi, P. (2007) 'Pangan dan daya saing bangsa', in Hariyadi, P. (ed.) Upaya Peningkatan Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan melalui Ilmu dan Teknologi. Bogor: SEAFAST Center IPB.
- Kaplinsky, R. and Morris, M. (2001) A Handbook for Value Chain Research. Brighton: Institute of Development Studies, University of Sussex.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2009) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik (Good Handling Practices). Jakarta: Kementan.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2012) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Proses Penanganan Panen dan Pascapanen Pala dan Fuli. Jakarta: Kementan.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2014) Statistik Pertanian 2014. Jakarta: Kementan.
- Nurdjannah, N. (2007) Teknologi Pengolahan Pala. Jakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian.
- Porter, M.E. (1985) Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press.
- Rismunandar (1992) Budidaya dan Tataniaga Pala. Jakarta: Penebar Swadaya.